

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan menjelaskan Hubungan Pelayanan Kesehatan untuk Fakir dengan Tingkat Kepuasan Pasien Akses Pengobatan di Kabupaten Situbondo. Kesehatan adalah bagian yang penting setiap masyarakat perlu adanya lembaga pemerintah yang memberikan rasa aman pada masyarakatnya dalam menjamin kesejahteraan lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan ketetapan UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ” Pelayanan Kesehatan salah satu factor untuk meningkat kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi pelayanan terhadap masyarakat miskin sehingga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program. Seperti halnya dengan masyarakat yang mampu membayar dengan akses yang tidak gratis diperlakukan sama, maka efektif pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu bisa mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan, di RSUD Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo menjadi salah satu yang melaksanakan program pelayanan kesehatan untuk fakir miskin guna mengcover masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utama adalah masyarakat. Karena ruang lingkup pelayanan kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat banyak maka peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan sangat besar. Masalah kesehatan memang bukan tanggung jawab pemerintah namun dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemerintah ikut adil, dalam akses pengobatan terhadap masyarakat terutamanya masyarakat miskin dari kualitas pelayanan kesehatan yang kurang berpihak, sehingga prosedur yang berbelit-belit ketika pengurusan administrasi

kesehatan kurang sosialisai oleh rumah sakit dan puskesmas tentang Pogram jaminan kesehatan kepada masyakat miskin, namun dalam kondisi nyata di lapangan tidak semua masyarkat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan sejak di sahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 1 ayat 5 “ bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan social ” di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bab III Peserta dan Kebersertaan ayat B “ peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) terdiri 2 kelompok yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan ” dan ayat C “ peserta penerima bantuan (PBI) jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu ” kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pasal 1 ayat 4 “ penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut PBI jaminan kesehataan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan ” tidak hanya kesehatan yang dirasakan kurang dalam pelayanan melainkan tindakan penanganan fakir miskin yang masih ada pembangunan kesehatan yang merata seharusnya dilakukan.

Ruang lingkup pembangunan kesehatan sangat luas,maka pelaksanaannya harus secara berencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Pada tiap – tiap tahap diharapkan di capai keselarasan pemerintah dan dinas yang terkait yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan kadar keadilan social yang meningkat, dengan mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuannya pembangunan nasional untuk kesehatan.

Pembanguna kesehatan yang belum merata walaupun sudah terkover dengan landasan konstitual Pancasila dan UUD 1945 masih banyak masyarkat miskin tidak mendapatkan pelayanan kesehatan perlunya strategi dari pemerintah seharusnya lebih peduli kepada masyarkat miskin agar seluruh masyarakat miskin mendapatkan pelayana kesehatan tanpa berbelit belit secara prosedur untuk mendukung pelayana terhadap masyarakt miskin maka pemerintah dan pihak rumah sakit dapat membantu dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk fakir miskin.

Masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Situbondo sekitar 1.578 masyarakat miskin dan 1.467 masyarakat sangat miskin, mereka banyak mengeluh dengan adanya pelayanan di rumah sakit atau dipuskesmas tidak dilayanan dengan baik oleh pegawai yang terkait mereka lebih mendahului masyarkat yang mampu untuk mendapatkan pelayanan seolah-olah program yang dilaksanakan hanya sebatas pertanggung jawaban tugas pemerintah terhadap pelayanan kesehatan untuk masyakrat miskin, tidak hanya itu tindakan medis yang dilakukan tidak segera dilakukan penangan karena alasan belum memenuhi admitrasi Rumah Sakit, Program yang seharusnya dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik diharapkan pemerintah lebih focus kepada masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh pemerintah belum bisa diatasi dengan baik, di Kabupaten Situbondo masih banyak masyarkaak yang miskin yang diakibatkan karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyakarakt miskin berdampak pada kestabilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan dengan tidak sepenuhnya tercukupi. Pangan masyarakat tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi berkakibat dengan kesehatan masyarakat. Peran Dinas Kesehatan juga diharapkan dapat mengatasi dengan memberikan sosialisasi kebutuhan gizi yang harus tercukupi dan mengatasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah :

Bagaimana Hubungan Pelayanan Kesehatan untuk Fakir Miskin terhadap tingkat Keluhan Akses Pengobatan RSUD dr. Abdoer Rahem di Kabupaten Situbondo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Masalah Penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Hubungan Pelayanan Kesehatan untuk Fakir Miskin terhadap tingkat Keluhan Akses Pengobatan RSUD dr. Abdoer Rahem di Kabupaten Situbondo?

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan kepada Direktur dr. RSUD Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo untuk Pelayanan Kesehatan Fakir miskin lebih baik dan efektif.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berminat melaukan penelitian dalam topik atau permasalahan yang sama.